



Papua Road Map: Memahami Akar Masalah & Solusi

FGD BRIN

Tim Penulis Buku Papua Road Map

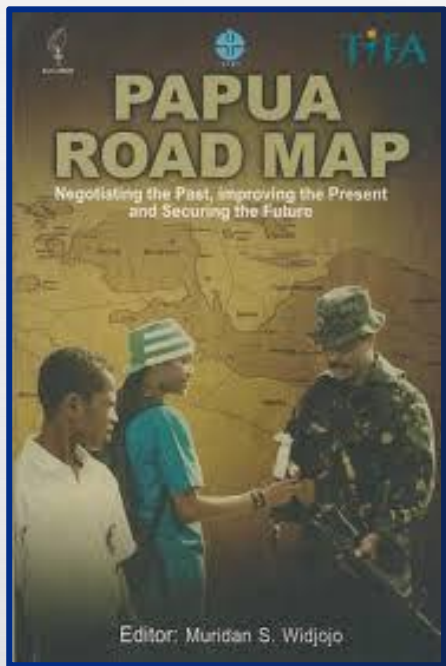
Jakarta, 28 Oktober 2024



Agenda

- I. Papua Road Map
- II. Updating Papua Road Map
- III. Dinamika Papua
- IV. Penutup

I. Papua Road Map



- Papua Road Map/PRM (2009): buku sesuai temuan dan analisis riset kompetitif LIPI (2004-2008) mengenai konflik Papua (selain riset mengenai Aceh, Maluku, tambang dan kehutanan)
- Masalah Papua dikaitkan dengan Otoda & daya saing. Sejauhmana konflik Papua berpengaruh pada daya saing Indonesia. Bagaimana Otsus dapat menjadi resolusi konflik?



Respons terhadap PRM

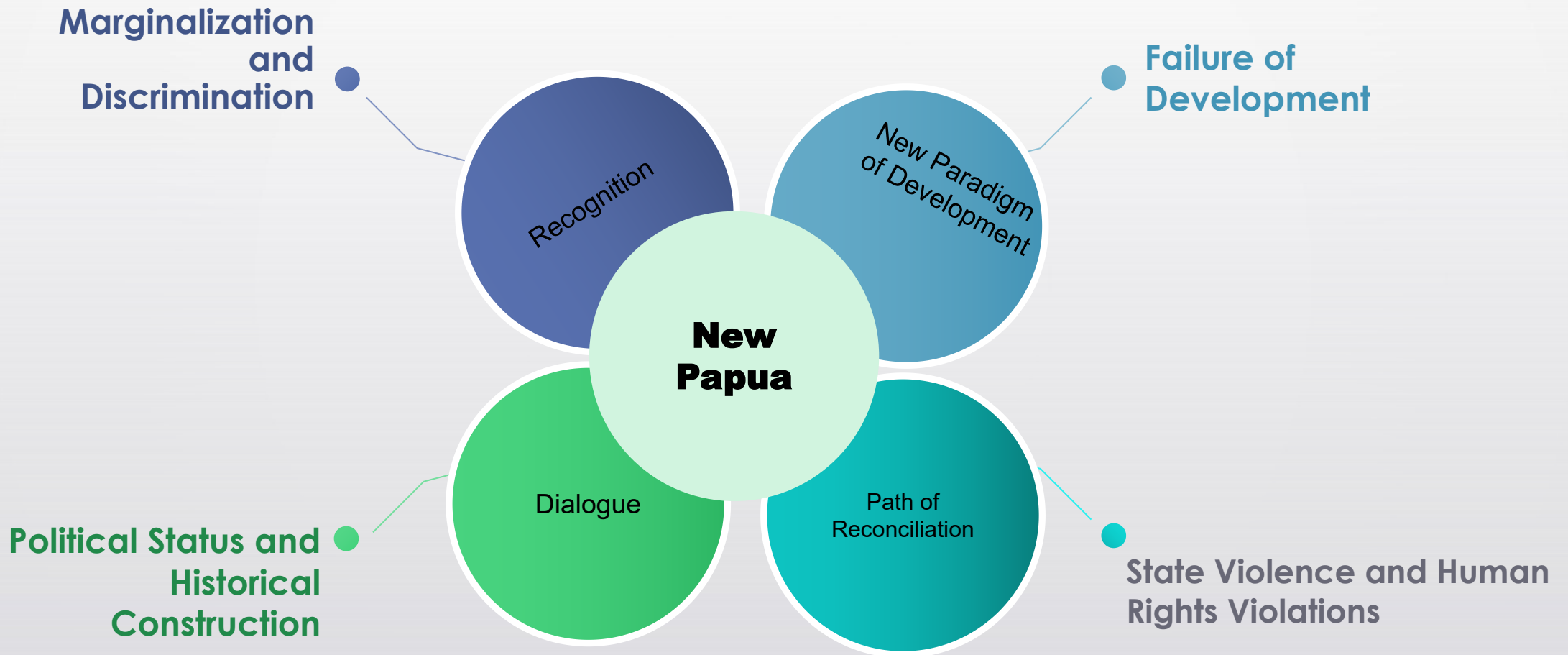
1. Tidak ada hal/sesuatu yang baru dlm PRM, tetapi menjadi konfirmasi bahwa masalah di Papua belum tertangani
2. LIPI/PRM bias Papua
3. Belum ada analisa mengenai geo-ekonomi Papua
4. Home ground initiative (apresiasi terhadap Pemerintah RI)
5. Dasar membangun jaringan untuk promosi pendekatan dialog (Jaringan Damai Papua/Papua Peace Network) pada 2011



Dua bagian utama di dalam PRM

1. Akar masalah
2. Tawaran solusi sesuai peta masalah

Model Papua Road Map 2009





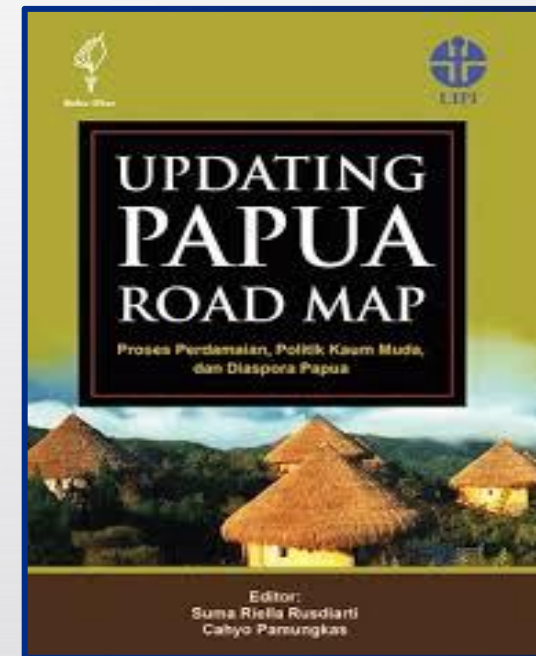
Bagaimana Orang membaca PRM?

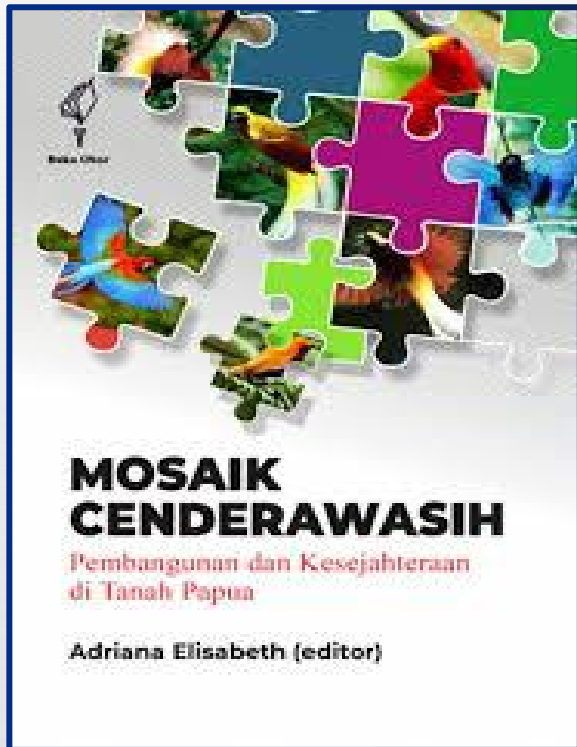
1. Sektoral/parsial
2. Fokus pada persoalan-persoalan yang saling berkorelasi
3. Persoalan di masa lalu yang belum selesai, namun berpengaruh pada kondisi Papua hari ini dan di masa depan
4. PRM tidak relevan dengan realita

II. Updating PRM

I. Tahun 2017: “Gerakan politik kaum muda dan diaspora Papua di luar negeri”

- Kebangkitan kaum muda Papua dalam politik (sejak reformasi 1998)
- Struktur OPM/ULMWP
- Peran diaspora Papua di luar negeri
- Peran Jaringan Damai Papua (JDP)
- Rekomendasi: Pendekatan dialog





II. Tahun 2020: “Mosaik Cenderawasih, pembangunan dan kesejahteraan Papua”

- Beberapa kemajuan di sektor prioritas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur)
- Kendala yg dihadapi dalam implementasi UU Otsus Papua karena konflik, kesulitan geografi, perbedaan sosial budaya, dll
- Rekomendasi: paradigma baru pembangunan berbasis budaya



III. Tahun 2024: “Situasi HAM dan Konflik Papua”

- Reproduksi kekerasan dan perluasan konflik
- Ketersediaan perangkat hukum dan aturan yang tidak terimplementasi
- Hak asasi perempuan Papua dari perspektif ekofeminisme
- HAM dari perspektif adat Papua
- Rekomendasi: demiliterisasi dan jeda kemanusiaan



III. Dinamika Papua

Evaluasi secara umum:

- Kemajuan pembangunan infrastruktur konektivitas & digitalisasi Papua
- Kemunduran penanganan konflik mengakibatkan kekerasan meluas
- Tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM (berat)
- Kerusakan lingkungan & marginalisasi secara masif



Dinamika Politik & Keamanan

2015-2024: Pemerintah RI

- Melepaskan 5 tahanan politik Papua
- Membentuk Tim Investigasi HAM mengusut kasus Wasior, Wamena, Paniai
- Menyetujui dialog sektoral, bahkan dialog dg kelompok pro referendum (2017)
- Membentuk TGPF kasus penembakan Pdt. Yeremias Zanambani, di Distrik Sugapa, Intan Jaya (September 2020)



- Satgas Damai Cartenz
- Penamaan kelompok pemberontak sebagai teroris (KSTP, Kelompok Teroris Separatis Papua) oleh Menko polhukam (April 2021)
- Penamaan KSTP menjadi OPM oleh Panglima TNI (2024)
- Pendekatan TNI - humanis tetapi tegas, Satgas Habema
- MoU jeda kemanusiaan 2023 dibatalkan
- Membentuk Tim PPHAM, termasuk penyelesaian isu HAM Papua secara non-yudisial
- Penyanderaan & pembebasan pilot Susi Air (7 Februari 2023 - 21 September 2024)



Dampak konflik bersenjata:

- Masalah pengungsi internal di beberapa kabupaten
- Kasus pelanggaran HAM tidak tuntas
- Rasisme
- Konflik komunal



Dinamika Ekonomi & pembangunan

2016-2024:

- KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua) di 52 kabupaten/kota seluruh (dari dana Otsus)
- Papua Muda Inspiratif (PMI) → bisnis start up dan ekonomi kreatif
- Penetapan dan pemberlakuan UU 2/2021 (hasil revisi terbatas pasal pemekaran & efisiensi dana Otsus)



- Petani Millennial Papua
- Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya (Agustus 2022)
- Papua Youth Creative Hub di Jayapura (Maret 2023)
- Infrastruktur konektivitas (Trans-Papua, tol laut, dll)
- Program PSN – cetak sawah di Merauke seluas 7000 Ha (tahap pertama)



Dampak terhadap ketidaksetaraan sosial ekonomi:

- Kapasitas SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- Akses pasar terbatas pada produk-produk lokal
- Ekonomi skala kecil/ekonomi rumah tangga berhadapan dengan medium-high scale/extractive industry
- Hilangnya fungsi tanah & hutan adat sebagai sumber ekonomi masyarakat Papua



Dinamika Sosial & Lingkungan

- Ethnic power change dan kompetisi sosial budaya (sejak Otsus 2001 & pemekaran DOB menjadi 6 provinsi)
- Land grabbing terhadap tanah & hutan adat berdampak pada identitas, eksistensi, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat adat Papua (MAP)
- Masyarakat bersama gereja & LSM melakukan pemetaan tanah adat secara partisipatif sebagai social resilience
- Perubahan iklim, pemanasan global, dan dampak dari industri tambang & mineral, kehutanan, dan perkebunan kelapa sawit.



Dampak Sosial dan Lingkungan:

- Deforestasi, tailing, dan alih fungsi lahan merugikan masyarakat adat
- Hilangnya biodiversitas
- Potensi kejahatan terhadap lingkungan secara masif berlanjut (isu ekosida)
- Salju abadi di Puncak Jayawijaya diprediksi akan punah pada 2026



IV. Penutup

1. APA YANG MAU DISELESAIKAN?
2. BAGAIMANA MENYELESAIKANNYA?

Terima kasih

Dr. Adriana Elisabeth, Prof. Dr. Cahyo Pamungkas,

Dr. Rosita Dewi